SKRIPSI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA JERORA 1 KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Oleh:

PUSPITA NATALISA

NIM. E1032211058

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA JERORA 1 KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Puspita Natalisa
NIM. E1032211058

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA JERORA 1 KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Oleh:

PUSPITA NATALISA
NIM. E1032211058

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Pertama

Prof. Dr. H. Martoyo, M.A : 5 / 05 / 2025
NIP. 196010031986031004

Dosen Pembimbing Kedua

Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si : 07 / 04 / 2025
NIP. 198506092015041002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA JERORA 1 KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

Oleh:

PUSPITA NATALISA
NIM. E1032211058

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Rabu, 11 Juni 2025
Waktu	: 11.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Sidang FISIP Untan

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. H. Martoyo, M.A	**Herri Junius Nge, S.Sos.,M.Si**
NIP. 196010031986031004	**NIP. 198506092015041002**

Penguji Pertama	Penguji Kedua
Martinus, S.Sos., M.Si	**Bima Sujendra, S.I.P.,M.Si**
NIP. 197212272006041002	**NIP. 198805072014041002**

Disahkan Oleh:

Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang dilaksanakan selama periode Juli hingga Oktober 2024. Informan penelitian mencakup Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat yang dipilih menggunakan teknik *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 telah menunjukkan upaya positif dalam aspek transparansi melalui pemanfaatan website desa dan papan informasi, dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi (99,26%) dari total ADD tahun 2024 sebesar Rp376.453.500 dengan realisasi Rp373.685.824. Namun, tantangan masih ditemukan terutama dalam penyajian informasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai format yang ditetapkan, meskipun masih terdapat permasalahan dalam akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan dokumentasi, serta forum pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the management of Village Fund Allocation (known as *Alokasi Dana Desa*/ADD) in Jerora 1 Village at Sintang District in Sintang Regency, with a particular focus on the implementation of good governance principles, including transparency, accountability, and community participation. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis conducted between July and October 2024. Informants in this study included the Village Head, village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and community representatives selected through purposive sampling. The findings revealed that the management of ADD in Jerora 1 Village demonstrated positive efforts in transparency, as evidenced by the use of the village website and information boards, along with a high budget absorption rate of 99.26% from the total 2024 allocation of IDR 376.453.500 with actual realization reaching IDR 373.685.824. Nevertheless, challenges persisted, particularly in presenting information in a manner accessible to all segments of the community. Regarding accountability, the village government has prepared financial reports in accordance with established formats. However, issues remained concerning the accuracy, timeliness, and completeness of documentation, as well as the effectiveness of accountability forums with the public.

Keywords: *Village Fund Allocation, Good Governance, Transparency, Accountability, Community Participation.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini mengkaji pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian dilakukan dengan fokus pada tiga aspek utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD sebesar Rp376.453.500 dengan realisasi Rp373.685.824 pada tahun 2024.

Pada bab pendahuluan, penelitian ini menjelaskan latar belakang permasalahan tentang pembangunan desa dan pentingnya Alokasi Dana Desa sebagai instrumen untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai tantangan dalam pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 diidentifikasi, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa (hanya 65%), permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan, lemahnya pengawasan (hanya 30% dari total pengeluaran ADD yang diaudit secara rinci), serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa (sekitar 40% perangkat desa belum mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan).

Tinjauan pustaka pada bab kedua menyajikan landasan teoritis yang mendukung penelitian, meliputi konsep pemerintahan desa, tata kelola keuangan desa, Alokasi Dana Desa, peran pemerintah desa, serta prinsip-prinsip *good governance*. Landasan teori utama yang digunakan adalah teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dari Grindle (2004), dengan tiga prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Kajian terhadap

penelitian terdahulu juga memperkaya perspektif dan kerangka analisis dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi lapangan di Desa Jerora 1 selama periode Juli hingga Oktober 2024, wawancara dengan informan kunci (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, anggota BPD, dan masyarakat), serta dokumentasi berupa foto, dokumen anggaran, dan arsip desa. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Bab tentang gambaran umum lokasi penelitian memberikan konteks komprehensif tentang Desa Jerora 1, mencakup sejarah dan status administratif, kondisi geografis dan topografi (luas wilayah ±27.000 hektar), demografis (populasi 1.608 jiwa dalam 434 kepala keluarga yang tersebar di lima dusun), klimatologi, pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana, struktur pemerintahan, potensi ekonomi, serta visi dan misi pembangunan desa. Informasi ini memberikan pemahaman tentang konteks lokal dimana pengelolaan ADD berlangsung.

Hasil penelitian dan pembahasan mengungkapkan bahwa dalam aspek transparansi, Desa Jerora 1 telah menunjukkan upaya positif melalui pemanfaatan papan informasi dan website desa (jerorasatu.com) yang memuat dokumen penting seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran. Meski demikian, tantangan masih ditemukan dalam hal penyajian informasi yang masih bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, serta keterbatasan akses

masyarakat terhadap informasi, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat desa atau belum memiliki literasi digital yang memadai.

Dalam aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban ADD sesuai format yang ditetapkan. Namun, masih ditemukan permasalahan dalam akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan dokumentasi. Forum pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Musyawarah Pertanggungjawaban (Muspertang) masih bersifat seremonial dan kurang substantif. Pengawasan oleh BPD juga belum berjalan optimal, dengan hanya sekitar 30% dari total pengeluaran ADD yang diaudit secara rinci.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD masih rendah, dengan keterlibatan dalam Musyawarah Desa hanya sekitar 65-70% dari undangan, dan keaktifan memberikan masukan hanya sekitar 20-25% dari yang hadir. Keterlibatan dalam pelaksanaan program ADD juga masih bersifat transaksional, dimana masyarakat berpartisipasi karena imbalan ekonomi bukan karena kesadaran sebagai hak dan tanggung jawab warga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 mencakup keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa dan BPD (hanya 33% perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pernah mengikuti pelatihan khusus), kompleksitas regulasi yang sering berubah, infrastruktur pendukung seperti teknologi informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat yang mempengaruhi tingkat partisipasi.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan tujuh strategi utama untuk meningkatkan pengelolaan ADD: (1) peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (2) penguatan transparansi melalui penyajian informasi yang lebih mudah dipahami dan aksesibel; (3) peningkatan akuntabilitas melalui penguatan mekanisme audit internal dan forum pertanggungjawaban yang lebih substantif; (4) penguatan partisipasi masyarakat dengan format Musyawarah Desa yang lebih inklusif dan metode partisipatif inovatif; (5) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (6) penguatan kolaborasi multi-pihak; serta (7) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Kesimpulannya, meskipun realisasi anggaran ADD tahun 2024 menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi (99,26%), penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 masih belum optimal. Upaya peningkatan transparansi melalui website desa dan pengembangan "Desa Cerdas Informasi" menunjukkan kesadaran pemerintah desa akan pentingnya keterbukaan, namun masih terdapat kesenjangan implementasi di tingkat praktis yang perlu diatasi. Implementasi rekomendasi yang diajukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan ADD sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : PUSPITA NATALISA

Nomor Mahasiswa : E1032211058

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 7 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



PUSPITA NATALISA

NIM. E1032211058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Dan tetap kuat! Lakukanlah segala pekerjaan mu dalam kasih"

(1 Korintus 16;14)

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melebihi segala daya pikir, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus."

(Filipi 4:6-7)

Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nafas kehidupan, keselamatan, kesehatan, rezeki serta selalu menyertai dan memberkati selama menjalani perkuliahan.
2. Orang tua tercinta, Bapak saya Pitrus dan Ibu saya Kristina yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan perjuangan saya dengan penuh cinta hingga dapat sampai pada titik ini. Terimakasih atas segala doa dan cinta kasih hal-hal baik dalam bentuk apapun itu yang sangat berharga bagi saya yang diberikan kepada saya selama saya hidup, terlebih saat saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Semoga hal baik yang kalian berikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
3. Adik saya tersayang, Meryl Amanda Kristin dan Grezel Maria, serta kakak dan abang saya Sofia Natalia dan Julius Firka. Terimakasih telah menjadi support system terbaik hingga saat ini.

4. Keluarga besar saya, terimakasih telah menjadi keluarga yang hangat, selalu memberikan dukungan kepada saya baik secara materi maupun non materi selalu bersedia menjadi rumah dan tempat pulang terbaik di saat saya berada dititik terlemah.
5. Kepada Aryando Sukarno, terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan terbesar selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, pengertian, dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis. Semoga karya ini dapat menjadi hadiah kecil untuk semua perhatian dan kasih sayang.
6. Terimakasih kepada Penulis yang telah berjuang keras, tidak menyerah, dan terus berusaha hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis telah menunjukkan ketekunan, kesabaran, dan dedikasi yang tak pernah padam, dan mampu mengatasi tantangan serta kesulitan selama proses penyusunan. Penulis, terima kasih atas kerja kerasmu, semangatmu, dan motivasimu yang tak pernah berhenti. Penulis berhasil! Dan semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dirimu sendiri yang kuat dan gigih. Terimakasih Penulis, kamu luar biasa!.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jerora 1 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akademik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan arahan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Dr. Ira Patriani, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, yang selalu mendukung kegiatan akademik mahasiswa.
3. Bima Sujendra, S.IP., M.Si, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan panduan akademik selama penulis menempuh studi.
4. Prof. Dr. H. Martoyo, MA, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memeberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ilmu yang tinggi.
5. Herri Junius, Nge, S.Sos., M.Si Pembimbing Pendamping, yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Semua pihak, baik dosen, staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta teman-teman mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun material.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pontianak, Mei 2025

Penulis

Puspita Natalisa

NIM. E1032211058

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xviii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Permasalahan 6

1.3. Fokus Penelitian 7

1.4. Rumusan Masalah 7

1.5. Tujuan Penelitian 7

1.6. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

2.1. Konsep Pemerintahan Desa 9

2.2. Tata Kelola Keuangan Desa 14

2.3. Alokasi Dana Desa (ADD) 20

2.4. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 26

2.5. Landasan Teori 30

2.6. Penelitian Terdahulu 34

2.7. Alur Pikir Penelitian 38

2.8. Pertanyaan Penelitian 41

BAB III METODE PENELITIAN **42**

3.1. Jenis Penelitian 42

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 45

3.3. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 46

3.4. Teknik Pengumpulan Data 47

3.5. Analisis Data 48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **51**

4.1. Sejarah dan Status Administratif Desa Jerora 1 51

4.2. Kondisi Geografis dan Topografi 52

4.3. Kondisi Demografis 54

4.4. Kondisi Klimatologi 56

4.5. Pemanfaatan Lahan dan Potensi Ekonomi 56

4.6. Sarana dan Prasarana 57

4.7. Struktur Pemerintahan Desa 59

4.8. Potensi Ekonomi Desa 60

4.9. Visi dan Misi Pembangunan 60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **62**

5.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jerora 1 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 62

5.2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan ADD 71

di Desa Jerora 1 71

5.3. Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 77

5.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 81

5.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 86

5.6. Strategi Peningkatan Pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 90

BAB VI PENUTUP 95

6.1. Kesimpulan 95

6.2. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA..... 101

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Administratif Desa Jerora 1 52

Tabel 4. 2 Lokasi dan Jarak Tempuh Desa Jerora 1 53

Tabel 4. 3 Batas Administratif Desa Jerora 1 54

Tabel 4. 4 Distribusi Administrasi Wilayah Desa Jerora 1 55

Tabel 4. 5 Kondisi Klimatologi Desa Jerora 1 56

Tabel 4. 6 Distribusi Pemanfaatan Lahan Desa Jerora 1 56

Tabel 4. 7 Fasilitas Pendidikan di Desa Jerora 1 57

Tabel 4. 8 Fasilitas Kesehatan di Desa Jerora 1 58

Tabel 4. 9 Lembaga Kemasyarakatan dan Kesenian 58

Tabel 4. 10 Struktur Perangkat Desa Jerora 1 59

Tabel 4. 11 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Jerora 1 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir..... 40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA 103

LAMPIRAN 2 LOKASI PENELITIAN 106

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN 107

LAMPIRAN 4 DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN 110

LAMPIRAN 5 BIODATA MAHASISWA.....111

LAMPIRAN 6 SURAT TUGAS PENELITIAN..... 104

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Dalam rangka mendukung pembangunan desa, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah pengalokasian Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Di samping Dana Desa, pemerintah juga menyediakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diberikan untuk mendukung operasional pemerintahan desa, pengelolaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa lebih lanjut menjelaskan bahwa ADD dialokasikan berdasarkan sebagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

ADD memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan operasional pemerintahan desa sekaligus mendorong kemandirian desa dalam pembangunan.

Di Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, ADD telah dialokasikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan desa. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Sintang, alokasi ADD untuk Desa Jerora 1 pada tahun 2023 mencapai Rp1,2 miliar. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan program pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas penggunaan ADD di Desa Jerora 1 masih menjadi isu penting yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Tantangan utama dalam pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 terletak pada beberapa aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat dalam proses Musyawarah Desa (Musdes) sering kali belum optimal. Berdasarkan laporan tahunan desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam Musdes hanya mencapai 65%, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat desa belum terlibat aktif dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain itu, proses perencanaan sering kali terkendala oleh minimnya data pendukung yang akurat sehingga menyebabkan kurang terarahnya program-program yang diusulkan.

Pada tahap pelaksanaan, terdapat kendala dalam manajemen keuangan desa yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2022, terdapat beberapa laporan penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Misalnya, penggunaan dana sebesar Rp150 juta untuk pembangunan jalan desa dilaporkan mengalami deviasi anggaran sebesar 10% tanpa justifikasi

yang jelas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek pengawasan juga menjadi isu penting dalam pengelolaan ADD. Meskipun telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas, pengawasan yang dilakukan masih bersifat normatif dan kurang efektif. Laporan audit desa tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 30% dari total pengeluaran ADD yang diaudit secara rinci. Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana desa.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan ADD. Berdasarkan hasil survei oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, sekitar 40% perangkat desa di Desa Jerora 1 belum mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Padahal, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD merupakan prasyarat utama untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dari sisi masyarakat, kurangnya pemahaman tentang fungsi dan manfaat ADD juga menjadi tantangan. Masyarakat Desa Jerora 1 umumnya hanya mengetahui bahwa ADD digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan dan

jembatan, tetapi tidak memahami bahwa dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Minimnya sosialisasi dari pemerintah desa menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam pengawasan penggunaan ADD, sehingga potensi penyimpangan dana sulit terdeteksi.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 memerlukan strategi yang lebih baik dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyusunan rencana pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program-program yang direncanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

Selanjutnya, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa aparatur desa wajib memiliki kompetensi dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah untuk memberikan pelatihan teknis kepada aparatur desa di Desa Jerora 1.

Dalam hal pengawasan, penguatan peran BPD dan masyarakat desa sangat penting. Pemerintah desa perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ADD. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas. Misalnya, dengan mengadopsi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), masyarakat dapat memantau realisasi anggaran secara online.

Terakhir, pemerintah desa perlu menyusun mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan bahwa desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada masyarakat melalui media yang mudah dijangkau. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana dana desa, termasuk ADD, digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan ADD di Desa Jerora 1 masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kajian yang mendalam tentang pengelolaan ADD diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada serta merumuskan strategi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan ADD di Desa Jerora 1, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan tata kelola dana desa.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian.

1. Perencanaan: Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ADD melalui Musyawarah Desa (Musdes) belum optimal. Data menunjukkan hanya sekitar 65% masyarakat yang terlibat, sehingga program-program yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan: Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD masih lemah. Misalnya, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar 10% dalam pembangunan infrastruktur tanpa justifikasi yang jelas, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ADD.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan secara efektif. Hanya 30% dari total pengeluaran ADD yang diaudit secara rinci, sehingga pengelolaan ADD rentan terhadap penyalahgunaan.
4. Kapabilitas SDM: Aparatur desa di Desa Jerora 1 menghadapi kendala kapasitas dalam pengelolaan keuangan ADD. Sebanyak 40% perangkat desa belum pernah mengikuti pelatihan teknis terkait pengelolaan keuangan desa, yang menyebabkan lemahnya penyusunan dan pelaporan anggaran sesuai dengan standar yang berlaku.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dengan menitikberatkan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kapasitas aparatur desa.

1.4. Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dengan meninjau aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kapasitas aparatur desa dalam mendukung pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan kajian di bidang pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ADD, sehingga lebih efektif dalam mendukung pembangunan desa.
2. Bagi Masyarakat Desa: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan ADD.
3. Bagi Pemerintah Daerah: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.